

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, J. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ke Dua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi Tolib. (2013). *Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yusionia.
- Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2005). Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KuhaP Dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perspektif*, 10(4), 416–433.
- H. Sunaryo & Ajen Dianawati. (2009). *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana* (Pertama). Jakarta: Visimedia.
- Ibrahim. (2017). Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana, 5, 1–19. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/8397-27588-1-PB.pdf
- Mulyadi. (2014). Kajian Yuridis Empiris Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, 1(1), 200–209.
- Poerwadarminta. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo Teguh. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayudi, G. (2008). *Seluk Beluk Hukum Pidana*. Jakarta: Boya Book.
- Randy A. Katiandagho. (2015). Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana, 4(2).
- Renggong Ruslan. (2014). *Hukum Acara Pidana* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Risdalina. (2015). Manfaat Dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHaP), 3(1), 93–103.
- Salam Faisal. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerodibroto Soenarto. (2012). *KUHP dan KUHaP* (Ke Lima). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yahya Harapah. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHaP (Penyidikan dan Penuntutan)* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 Tentang Penangguhan Penahanan.

Peraturan Perundang-undangan No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (terakhir diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Jaminan Penangguhan Penahanan).

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Pelaksanaan Penangguhan Penahanan.